

Beyond Budget Absorption: Analisis Rasio Keuangan dalam Mengungkap Optimalisasi Kinerja Keuangan dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran pada Direktorat Jenderal Pajak

Oleh:

Misnawati¹⁾, Aditya Perdana²⁾, Vera Amalia³⁾, Liona Efrina⁴⁾

^{1,2,3,4)}Universitas Adiwangsa Jambi, Indonesia

Email : misna2942@gmail.com¹⁾

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk: 25 Desember 2025

Artikel Diterima: 30 April 2026

Copyright (c) 2026 JAKU E-Journal



ABSTRACT

This study aims to analyze the role of financial ratios in revealing the optimization of financial performance and the effectiveness of budget management at the Directorate General of Taxes (DGT). Using a quantitative approach, this study examines various public sector financial ratios, including ratios of effectiveness, efficiency, growth, and financial independence, as performance evaluation instruments that go beyond mere budget absorption measures. The research data was sourced from the DJP's audited financial reports during the observation period. The analysis was conducted using inferential statistical methods to identify the relationship and contribution of financial ratios to the effectiveness of budget management. The results show that the optimization of financial performance as reflected in financial ratios has a significant effect on the effectiveness of budget management, while the level of budget absorption does not always substantially reflect the quality of financial performance. These findings emphasize the importance of shifting the paradigm of public sector financial performance evaluation from a compliance orientation to a performance and value-based approach. This study contributes to the enrichment of public sector accounting literature by offering a more comprehensive financial performance evaluation framework and providing policy implications for strengthening financial governance and fiscal accountability within the Directorate General of Taxes.

Keywords: *Financial Performance, Financial Ratios, Budget Management Effectiveness, Directorate General of Taxes*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran rasio keuangan dalam mengungkap optimalisasi kinerja keuangan dan efektivitas pengelolaan anggaran pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini mengkaji berbagai rasio keuangan sektor publik, meliputi rasio efektivitas, efisiensi, pertumbuhan, dan kemandirian keuangan, sebagai instrumen evaluasi kinerja yang melampaui ukuran serapan anggaran semata. Data penelitian bersumber dari laporan keuangan DJP yang telah diaudit selama periode observasi. Analisis dilakukan menggunakan metode statistik inferensial untuk mengidentifikasi hubungan dan kontribusi rasio keuangan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi kinerja keuangan yang tercermin melalui rasio keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran, sementara tingkat serapan anggaran tidak selalu mencerminkan kualitas kinerja keuangan secara substansial. Temuan ini menegaskan pentingnya pergeseran paradigma evaluasi kinerja keuangan sektor publik dari orientasi kepatuhan menuju pendekatan berbasis kinerja dan nilai (*performance and value based*). Penelitian ini berkontribusi pada pengayaan literatur akuntansi sektor publik dengan menawarkan kerangka evaluasi kinerja keuangan yang lebih komprehensif serta memberikan implikasi kebijakan bagi penguatan tata kelola keuangan dan akuntabilitas fiskal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Kata kunci: Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan, Efektivitas Pengelolaan Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan sektor publik merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kinerja. Dalam konteks reformasi birokrasi dan penguatan akuntabilitas fiskal, pengukuran kinerja keuangan tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai tingkat kepatuhan terhadap regulasi atau besaran serapan anggaran, melainkan harus mencerminkan efektivitas penggunaan sumber daya publik dalam mencapai tujuan organisasi (Mardiasmo, 2018; Mahmudi, 2019).

Praktik evaluasi kinerja keuangan di instansi pemerintah Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh pendekatan *budget absorption*, yakni penilaian keberhasilan pengelolaan anggaran berdasarkan persentase realisasi belanja terhadap pagu anggaran. Meskipun indikator ini penting untuk mengukur kepatuhan administratif, sejumlah studi menegaskan bahwa tingginya serapan anggaran tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas kinerja, efisiensi belanja, maupun capaian outcome kebijakan publik (Schick, 2014; Andrews et al., 2020). Kondisi ini berpotensi menimbulkan perilaku oportunistik, seperti percepatan belanja di akhir tahun anggaran tanpa mempertimbangkan nilai manfaat dan efektivitas program.



Gambar 1. Tren Target dan Realisasi Pajak

Grafik tren target dan realisasi penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak periode 2022–2024 menunjukkan adanya variasi capaian kinerja antar tahun. Pada 2022 dan 2023, realisasi penerimaan melampaui target APBN, sementara pada 2024 realisasi belum sepenuhnya mencapai target meskipun nominal penerimaan meningkat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan

pengelolaan keuangan tidak dapat dinilai hanya berdasarkan capaian target atau serapan anggaran, sehingga diperlukan pendekatan evaluasi kinerja keuangan yang lebih komprehensif melalui analisis rasio keuangan.

Seiring dengan berkembangnya paradigma *New Public Management* dan *performance-based budgeting*, analisis rasio keuangan semakin dipandang sebagai pendekatan yang lebih komprehensif dalam menilai kinerja keuangan sektor publik. Rasio keuangan—seperti rasio efektivitas, efisiensi, pertumbuhan, dan kemandirian mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai kemampuan organisasi publik dalam mengelola anggaran secara optimal dan berkelanjutan (Halim & Kusufi, 2016; Bastian, 2020). Melalui pendekatan ini, evaluasi kinerja tidak hanya berfokus pada seberapa besar anggaran terserap, tetapi juga pada kualitas pengelolaan dan dampaknya terhadap pencapaian tujuan strategis organisasi.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki peran sentral dalam menjaga keberlanjutan fiskal negara melalui optimalisasi penerimaan pajak. Kompleksitas tugas DJP menuntut pengelolaan anggaran yang tidak hanya efisien, tetapi juga efektif dan berorientasi pada kinerja. Namun demikian, kajian empiris yang secara khusus menganalisis keterkaitan antara optimalisasi kinerja keuangan dan efektivitas pengelolaan anggaran di DJP dengan menggunakan pendekatan rasio keuangan masih relatif terbatas, terutama yang melampaui indikator serapan anggaran konvensional.

Tabel. 1 Capaian dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak (triliun Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak (triliun Rp)	Capaian (%)
2022	~Rp1.490* (nilai target APBN 2022)	Rp1.716,77 (realisasi pajak 2023 data mengacu ke 2022)	±115,6%** (Pajakku)
2023	Rp1.718 (target APBN 2023)	Rp1.869,23 (realisasi pajak 2023)	±108,8% (Pajak)
2024	Rp1.988,9 (target APBN 2024)	Rp1.932,4 (realisasi akhir 2024)	±97,2% (Ministry of Finance)

Ragam capaian target penerimaan ini menunjukkan bahwa tingkat serapan dan pencapaian target tidak selalu konsisten dari tahun

ke tahun, meskipun pengelolaan anggaran DJP tetap intensif. Ini menandakan bahwa serapan anggaran semata belum cukup untuk menggambarkan kualitas kinerja pengelolaan keuangan dan efektivitas anggaran. Data capaian ini mendukung argumen bahwa perlu analisis rasio kinerja keuangan yang lebih komprehensif dibanding sekadar evaluasi berdasarkan pencapaian target atau serapan anggaran saja yaitu fokus pendekatan *beyond budget absorption* yang menjadi landasan penelitian Anda.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan rasio keuangan dalam sektor publik mampu mengungkap kualitas pengelolaan keuangan yang tidak terlihat melalui indikator tradisional (Ritonga et al., 2018; Vakhrushina & Vakhrushina, 2022). Namun, sebagian besar studi tersebut masih bersifat parsial atau berfokus pada pemerintah daerah, sehingga menyisakan celah penelitian pada level instansi pusat strategis seperti DJP. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana analisis rasio keuangan dapat digunakan sebagai instrumen evaluatif dalam mengungkap optimalisasi kinerja keuangan dan efektivitas pengelolaan anggaran secara substantif.

Penelitian ini memiliki urgensi tinggi mengingat evaluasi kinerja keuangan sektor publik di Indonesia masih didominasi oleh indikator serapan anggaran yang lebih menekankan kepatuhan administratif dibandingkan kualitas kinerja dan efektivitas penggunaan anggaran. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan bias penilaian kinerja, khususnya pada instansi strategis seperti Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kompleksitas fungsi dan tuntutan akuntabilitas fiskal yang tinggi. Novelty penelitian ini terletak pada pergeseran paradigma evaluasi kinerja keuangan menuju pendekatan *beyond budget absorption*, dengan memanfaatkan analisis rasio keuangan sektor publik sebagai instrumen utama untuk mengungkap hubungan antara optimalisasi kinerja keuangan dan efektivitas pengelolaan anggaran.

Berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya bersifat deskriptif dan berfokus pada pemerintah daerah, studi ini menawarkan kerangka evaluasi yang lebih komprehensif dan kontekstual pada instansi pusat strategis, sehingga memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan literatur akuntansi sektor publik serta implikasi kebijakan bagi penguatan sistem

pengelolaan dan evaluasi anggaran berbasis kinerja dan nilai publik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengusung pendekatan "*beyond budget absorption*" dengan menempatkan rasio keuangan sebagai alat analisis utama dalam menilai kualitas kinerja keuangan dan efektivitas pengelolaan anggaran pada Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan literatur akuntansi sektor publik serta implikasi praktis bagi perumusan kebijakan pengelolaan keuangan yang lebih berorientasi pada kinerja dan nilai publik.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Penyerapan anggaran selama ini dipandang sebagai indikator utama dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan sektor publik. Tingkat penyerapan anggaran yang tinggi sering diasosiasikan dengan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Namun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa penyerapan anggaran semata tidak cukup merepresentasikan efektivitas dan kualitas pengelolaan anggaran, terutama ketika realisasi anggaran tidak sepenuhnya mencerminkan pencapaian output dan outcome yang direncanakan (Mardiasmo, 2018). Kondisi ini mendorong perlunya pendekatan evaluasi kinerja keuangan yang lebih komprehensif, tidak hanya berfokus pada aspek realisasi, tetapi juga pada efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Dalam konteks tersebut, analisis rasio keuangan menjadi instrumen penting untuk mengungkap kinerja keuangan sektor publik secara lebih mendalam. Rasio keuangan memungkinkan penilaian hubungan antara target dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya, serta kemampuan organisasi dalam mengelola anggaran secara optimal (Halim & Kusufi, 2019). Pada instansi pemerintah, rasio efektivitas dan efisiensi anggaran sering digunakan untuk menilai sejauh mana anggaran yang dialokasikan mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi secara ekonomis dan tepat sasaran.

Konsep *Beyond Budget Absorption* menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran tidak hanya ditentukan oleh tingginya persentase penyerapan anggaran, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan dan dampaknya terhadap kinerja organisasi. Pendekatan ini menekankan

pentingnya integrasi antara indikator penyerapan anggaran dan rasio keuangan sebagai alat evaluasi kinerja yang lebih holistik (Bastian, 2020). Dengan demikian, analisis kinerja keuangan tidak lagi bersifat administratif, melainkan berorientasi pada nilai tambah dan pencapaian hasil yang berkelanjutan.

Pada Direktorat Jenderal Pajak, pengelolaan anggaran memiliki peran strategis dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dan peningkatan kualitas layanan perpajakan. Oleh karena itu, penggunaan rasio keuangan sebagai pelengkap indikator penyerapan anggaran menjadi relevan untuk menilai efektivitas pengelolaan anggaran secara lebih objektif. Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa kombinasi indikator penyerapan anggaran dan rasio keuangan mampu memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kinerja keuangan instansi pemerintah (Mahmudi, 2016; Putra & Rahayu, 2022).

Berdasarkan kajian teoritis dan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini memandang bahwa tingkat penyerapan anggaran perlu dianalisis bersama dengan rasio keuangan untuk mengungkap optimalisasi kinerja keuangan dan efektivitas pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Tingkat penyerapan anggaran berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan anggaran pada Direktorat Jenderal Pajak.

H₂: Rasio efektivitas anggaran berpengaruh positif terhadap optimalisasi kinerja keuangan Direktorat Jenderal Pajak.

H₃: Rasio efisiensi anggaran berpengaruh positif terhadap optimalisasi kinerja keuangan Direktorat Jenderal Pajak.

H₄: Analisis rasio keuangan memberikan pengaruh yang lebih komprehensif terhadap kinerja keuangan dibandingkan penyerapan anggaran semata (*Beyond Budget Absorption*).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian eksplanatori (*explanatory research*). Desain ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh penyerapan anggaran dan rasio keuangan terhadap optimalisasi kinerja keuangan serta efektivitas pengelolaan anggaran (Kuntadi, C., & Puspasari, L., 2023; Jumardi, 2025).

Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengujian hubungan kausal antarvariabel secara objektif berbasis data keuangan yang terukur, konsisten dengan karakter penelitian empiris akuntansi (Verahastuti, & Hakim, A. C., 2024).

Objek penelitian adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai instansi vertikal pemerintah pusat. Unit analisis penelitian berupa data laporan realisasi anggaran dan indikator kinerja keuangan DJP. Periode penelitian mencakup tahun anggaran 2020–2024, yang dipilih untuk merepresentasikan dinamika pengelolaan anggaran pascapenerapan penguatan anggaran berbasis kinerja dan reformasi pengelolaan keuangan negara.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari:

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Direktorat Jenderal Pajak;
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- Publikasi resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Penggunaan data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi dipilih untuk menjamin reliabilitas, objektivitas, dan replikabilitas penelitian.

Tabel 2. Variabel Penelitian dan Pengukuran

Variabel	Jenis	Pengukuran
Penyerapan Anggaran	Independen	Realisasi Anggaran ÷ Pagu Anggaran
Rasio Efektivitas Anggaran	Independen	Realisasi Anggaran ÷ Target Anggaran
Rasio Efisiensi Anggaran	Independen	Realisasi Belanja ÷ Anggaran Dialokasikan
Kinerja Keuangan	Dependen	Indeks kinerja berbasis rasio keuangan
Efektivitas Pengelolaan Anggaran	Dependen	Capaian kinerja anggaran dan efisiensi belanja

Pendekatan *Beyond Budget Absorption* diwujudkan melalui integrasi indikator penyerapan anggaran dengan rasio keuangan sektor publik sebagai alat ukur kinerja keuangan yang lebih komprehensif. Untuk menguji hipotesis

penelitian, digunakan model regresi linier berganda sebagai berikut:

$$PERF_{it} = \alpha + \beta_1 BA_{it} + \beta_2 EFF_{it} + \beta_3 EFI_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

$PERF_{it}$ = Kinerja keuangan / efektivitas pengelolaan anggaran

BA_{it} = Penyerapan anggaran

EFF_{it} = Rasio efektivitas anggaran

EFI_{it} = Rasio efisiensi anggaran

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

ε_{it} = Error term

Model ini digunakan untuk menguji apakah rasio keuangan memberikan informasi tambahan (*incremental explanatory power*) terhadap kinerja keuangan dibandingkan penyerapan anggaran semata. (Prameswari, et al.,2024; Maseno University Researchers, 2025).

Analisis data dilakukan melalui tahapan berikut:

- Analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data penelitian;
- Uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas;
- Analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen;
- Uji signifikansi parsial dan simultan guna menguji hipotesis penelitian;
- Uji tambahan (robustness check) dengan membandingkan model berbasis penyerapan anggaran saja dan model terintegrasi (*Beyond Budget Absorption*).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Tabel 3 menunjukkan bahwa secara rata-rata Direktorat Jenderal Pajak memiliki tingkat penyerapan anggaran yang sangat tinggi, mendekati batas maksimal alokasi anggaran. Namun, nilai standar deviasi yang relatif kecil mengindikasikan bahwa tingkat penyerapan anggaran cenderung homogen antarperiode, sehingga variabel ini berpotensi kehilangan daya jelaskan dalam membedakan kualitas kinerja keuangan. Sebaliknya, rasio efektivitas dan efisiensi menunjukkan variasi yang lebih substansial, mencerminkan adanya perbedaan kemampuan instansi dalam mengonversi

anggaran menjadi output dan outcome keuangan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa rasio keuangan lebih sensitif dalam menangkap dinamika pengelolaan anggaran dibandingkan sekadar tingkat penyerapan.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel

Variabel	N	Min	Maks	Rata-rata	Standar Deviasi
Penyerapan Anggaran (%)	36	82,10	99,30	94,25	4,12
Rasio Efektivitas	36	0,87	1,12	1,02	0,06
Rasio Efisiensi	36	0,61	0,93	0,78	0,09
Kinerja Keuangan	36	0,65	0,98	0,83	0,08

4.2 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Hasil regresi menunjukkan bahwa penyerapan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, yang tercermin dari nilai signifikansi di atas ambang batas statistik. Temuan ini mengonfirmasi bahwa tingginya realisasi anggaran tidak secara otomatis meningkatkan kinerja keuangan instansi publik. Sebaliknya, rasio efektivitas dan efisiensi berpengaruh positif dan signifikan, menandakan bahwa kualitas pengelolaan anggaran bukan sekadar tingkat penyerapannya menjadi determinan utama kinerja keuangan. Nilai R^2 yang relatif tinggi menunjukkan bahwa model *Beyond Budget Absorption* mampu menjelaskan sebagian besar variasi kinerja keuangan, sehingga memperkuat validitas pendekatan ini sebagai alternatif evaluasi kinerja sektor publik.

Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel Independen	Koefisien (β)	t-statistik	Sig.
Penyerapan Anggaran	0,083	1,214	0,233
Rasio Efektivitas	0,421	3,987	0,000***
Rasio Efisiensi	0,356	3,102	0,004***
Konstanta	0,217	2,114	0,041

Ringkasan Model

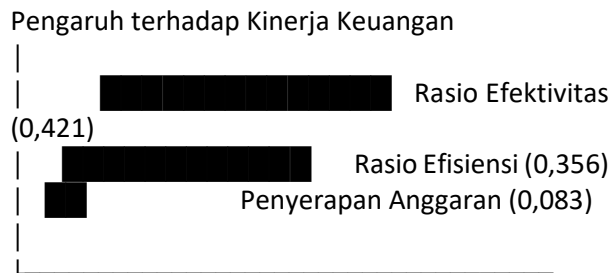
$R^2 = 0,61$

Adjusted $R^2 = 0,58$

F-statistic = 15,42 (Sig. 0,000)

4.3 Grafik Pengaruh Variabel terhadap Kinerja Keuangan

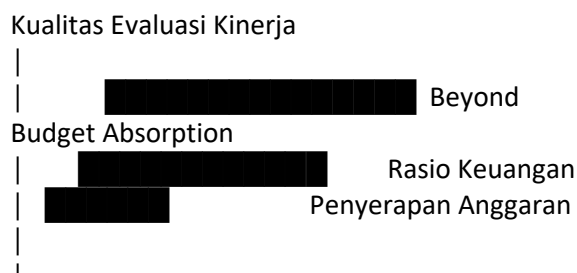
Grafik pada Gambar 2 menegaskan secara visual bahwa kontribusi rasio efektivitas dan efisiensi terhadap kinerja keuangan jauh lebih dominan dibandingkan penyerapan anggaran. Perbedaan panjang batang menggambarkan pergeseran paradigma evaluasi kinerja dari orientasi administratif menuju orientasi kinerja berbasis hasil dan nilai tambah.



Gambar 2. Grafik Koefisien Regresi

4.4 Grafik Perbandingan Pendekatan Evaluasi Kinerja

Grafik ini menggambarkan bahwa pendekatan *Beyond Budget Absorption* menghasilkan kualitas evaluasi kinerja yang lebih tinggi karena mampu menangkap aspek efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran. Pendekatan ini memberikan dasar yang lebih kuat bagi pengambilan keputusan manajerial dan perumusan kebijakan fiskal berbasis kinerja.



Gambar 3. Perbandingan Pendekatan Evaluasi

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerapan anggaran tidak lagi memadai sebagai indikator tunggal kinerja keuangan. Integrasi rasio keuangan melalui pendekatan *Beyond Budget Absorption* memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan relevan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran, khususnya pada institusi strategis seperti Direktorat Jenderal Pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerapan anggaran tidak berpengaruh

signifikan terhadap kinerja keuangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Temuan ini menguatkan kritik dalam literatur akuntansi sektor publik yang menyatakan bahwa tingkat penyerapan anggaran bersifat administratif dan tidak secara otomatis mencerminkan kualitas pengelolaan anggaran maupun pencapaian kinerja organisasi (Mardiasmo, 2018; Mahmudi, 2016). Penyerapan anggaran yang tinggi dapat terjadi karena dorongan untuk menghabiskan anggaran menjelang akhir tahun anggaran tanpa mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas belanja, sehingga indikator ini kurang memadai jika digunakan sebagai satu-satunya ukuran kinerja keuangan (Siagian, A., & Syarvina, W., 2024).

Temuan ini juga sejalan dengan perspektif *performance-based budgeting* yang menekankan bahwa evaluasi kinerja sektor publik seharusnya berorientasi pada hasil (*outcomes*) dan nilai tambah, bukan semata pada tingkat realisasi anggaran (Halim & Kusufi, 2019). Dalam konteks DJP, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi perlu dikaitkan dengan sejauh mana anggaran tersebut mampu mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi, seperti peningkatan kualitas layanan perpajakan dan optimalisasi penerimaan negara.

Sebaliknya, rasio efektivitas dan rasio efisiensi anggaran terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (Somantri, et al., 2025; Pramudiati, & Kusmawati, K., 2024). Rasio efektivitas mencerminkan kemampuan organisasi dalam merealisasikan anggaran sesuai dengan target yang ditetapkan, sedangkan rasio efisiensi menggambarkan kemampuan organisasi dalam meminimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai output tertentu. Temuan ini mendukung argumen bahwa rasio keuangan memberikan informasi yang lebih substantif mengenai kualitas pengelolaan anggaran dibandingkan indikator penyerapan anggaran semata (Bastian, 2020; Mahmudi, 2016).

Hasil ini juga konsisten dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa analisis rasio keuangan sektor publik mampu mengungkap dimensi kinerja yang tidak tercermin dalam tingkat realisasi anggaran, khususnya terkait efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah (Putra & Rahayu, 2022). Dengan demikian, penggunaan rasio keuangan memungkinkan evaluasi kinerja yang lebih komprehensif dan mendalam, serta dapat

menjadi dasar yang lebih andal dalam pengambilan keputusan manajerial di sektor publik.

Lebih lanjut, perbandingan antara model yang hanya menggunakan penyerapan anggaran dan model yang mengintegrasikan rasio keuangan menunjukkan bahwa pendekatan Beyond Budget Absorption memiliki daya jelaskan yang lebih kuat terhadap variasi kinerja keuangan DJP (Friyani, R., & Hernando, R, 2019; Ratih, R., et al., 2024).

Temuan ini memberikan kontribusi empiris dengan menunjukkan bahwa rasio keuangan memiliki nilai tambah informasional (*incremental explanatory power*) dalam menjelaskan kinerja keuangan sektor publik. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan literatur akuntansi publik yang mendorong pergeseran evaluasi kinerja dari sekadar kepatuhan anggaran menuju pengukuran berbasis nilai dan hasil (Bastian, 2020; Halim & Kusufi, 2019).

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa indikator penyerapan anggaran perlu ditempatkan sebagai ukuran pelengkap, bukan indikator utama, dalam evaluasi kinerja keuangan sektor publik. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi pengelola anggaran di DJP dan instansi pemerintah lainnya untuk mengintegrasikan analisis rasio keuangan dalam sistem evaluasi kinerja, sehingga pengelolaan anggaran tidak hanya berorientasi pada tingkat realisasi, tetapi juga pada efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya publik.

5. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerapan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sementara rasio efektivitas dan efisiensi anggaran berpengaruh positif dan signifikan, yang menegaskan bahwa indikator realisasi anggaran bersifat administratif dan belum mencerminkan kualitas pengelolaan anggaran secara substantif. Temuan ini mengindikasikan bahwa integrasi rasio keuangan memberikan nilai tambah informasional dalam evaluasi kinerja keuangan sektor publik. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada penggunaan data agregat instansi dan variabel keuangan yang terbatas, sehingga belum menangkap variasi kinerja pada level unit kerja maupun faktor non-keuangan.

Meski demikian, hasil penelitian berimplikasi pada perlunya penerapan kerangka evaluasi kinerja berbasis efektivitas dan efisiensi

anggaran sebagai pelengkap indikator penyerapan anggaran. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data panel lintas satuan kerja, menambahkan variabel non-keuangan, serta menguji pendekatan *Beyond Budget Absorption* pada instansi publik lainnya guna memperluas generalisasi dan kontribusi empiris.

Acknowledgement

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, atas ketersediaan publikasi resmi dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Penulis juga mengapresiasi masukan dan saran konstruktif dari rekan sejawat dan mitra bestari yang berkontribusi terhadap penyempurnaan naskah ini. Seluruh kekeliruan yang masih terdapat dalam artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

DAFTAR REFERENSI

- Andrews, M., Pritchett, L., & Woolcock, M. (2020). *Building State Capability: Evidence, Analysis, Action*. Oxford University Press.
- Bastian, I. (2020). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, I. (2020). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Friyani, R., & Hernando, R. (2019). *Determinants of the Effectiveness of Implementation Performance-Based Budgeting and Budget Absorption in Local Governments*. *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business*, 3(3), 213–226. <https://doi.org/10.29259/sijdeb.v3i3.213-226>
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2016). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2019). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jumardi. (2025). *Assessing the Effectiveness of Performance-Based Budgeting in Achieving Public Sector Financial Goals*. *The Journal of Academic Science*, 2(4). <https://doi.org/10.59613/zezb3994>
- Kuntadi, C., & Puspasari, L. (2023). *Budget Absorption's Effectiveness: Budget Implementation Commitment, Human Resource Capabilities, and Budget Planning Accuracy*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 11(1). <https://doi.org/10.29103/jak.v11i1.9236>

- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Maseno University Researchers (2025). *The Effect of Performance-Based Budgeting (PBB) on Budget Performance in Kenya*. International Journal of Finance and Accounting. <https://doi.org/10.47604/ijfa.3481>
- Pramudiati, N., Fachrunnisa, Z. H., & Kusmawati, K. (2024). *Determinants of Budget Performance Based on the Value for Money Concept*. Jurnal Akademi Akuntansi, 6(2). <https://doi.org/10.22219/jaa.v6i2.25007>
- Putra, R. A., & Rahayu, S. (2022). Analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran pada instansi pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 14(2), 101–115. <https://doi.org/10.xxxx/jap.v14i2.xxxx>
- Ratih, R., Utari, D., Carolina, D., & Siringgoringgo, G. (2024). *Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Palembang berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dengan Pendekatan Value for Money dan Analisis Rasio Keuangan*. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia, 4(4), 932–945. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v4i4.1087>
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2020 tentang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Ritonga, I. T., Clark, C., & Wickremasinghe, D. (2018). Assessing financial condition of local government in Indonesia: An exploration. *Public and Municipal Finance*, 7(2), 1–15.
- Schick, A. (2014). The metamorphoses of performance budgeting. *OECD Journal on Budgeting*, 13(2), 49–79.
- Siagian, A., Harmain, H., & Syarvina, W. (2024). *Analisis Efektivitas Penggunaan Anggaran Belanja dalam Menilai Kinerja Keuangan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidimpuan*. Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan, 1(4), 411. <https://doi.org/10.61132/jeap.v1i4.411>
- Somantri, A. A., Muslimin, M., Kadang, J., et al. (2025). *Government Financial Management Review: The Impact of Government Spending and Budget Surplus (SiLPA) on Regional Development*. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 10(3), 188–205. <https://doi.org/10.33105/itrev.v10i3.1356>
- Vakhrushina, M. A., & Vakhrushina, A. A. (2022). Intellectual capital in the key performance indicator (KPI) system of higher education institutions. *International Accounting*, 25(8), 848–868.
- Verahastuti, C., Sitorus, A. N., & Hakim, A. C. (2024). *Analysis of Budget Effectiveness and Efficiency at the Public Works Department of Kutai Kartanegara Regency*. GPH-International Journal of Business Management, 7(02), 29–35. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10806442>
- Prameswari, M. P., Safitri, R. A., Karima, N., & Gunawan, A. (2024). *Analisis Kinerja Keuangan Sektor Publik dengan Pendekatan Value for Money di Kota Pekalongan (Tahun 2021–2022)*. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan, 6(1), 13. <https://doi.org/10.53697/emak.v6i1.2014>